

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan itu sendiri dapat dipandang dari arti luas dan arti teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik individu. (Kneller 1967 : 63 dalam Dwi Siswoyo 2008 : 17)

Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. (Mudyahardjo 2001 : 6).

Jumlah penduduk di suatu wilayah terkadang tidak diimbangi dengan mutu pendidikan yang memadai. Hal ini dapat terjadi apabila di satu pihak pemberian layanan pendidikan belum menemukan cara yang paling tepat, di pihak lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, serta semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup sosial masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan.

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat berbanding lurus dengan bertambahnya pemenuhan kebutuhan, salah satunya dibidang pendidikan. Peran pendidikan tentu sangat besar dalam pembentukan karakter suatu bangsa dan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan tersebut salah satunya didukung oleh adanya fasilitas pendidikan yang memadai. Dunia pendidikan bukan sekedar cermin kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebuah kinerja terus menerus, sebuah usaha pembaharuan sebab yang terlibat di dalamnya adalah manusia itu sendiri.

Fasilitas pendidikan merupakan sarana dasar yang diperlukan dalam program pendidikan dan merupakan salah satu fasilitas sosial yang penting bagi penduduk. Ketercukupan fasilitas pendidikan yang menyangkut sarana dan prasarana akan sangat menunjang keberhasilan program pendidikan. Fasilitas pendidikan bersama dengan fasilitas sosial lainnya seperti fasilitas peribadatan, kesehatan, kependudukan, melayani kebutuhan penduduk yang memberi kepuasan sosial, mental dan spiritual.

Dalam khasanah peristilahan pendidikan sering disebut istilah sarana dan prasarana pendidikan. Istilah itu sering digabung menjadi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam bahasa Inggris, sarana dan prasarana disebut dengan *facility (facilities)*, sehingga, sarana dan prasarana pendidikan disebut *educational facilities*. Sebutan itu jika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu (alat dan barang) yang memfasilitasi (memberikan kemudahan) dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kombinasi antara analisis keruangan dengan analisis ekologi disebut analisis kombinasi wilayah. pada pendekatan ini wilayah-wilayah didekati dengan pengertian *areal differentiation* yaitu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan

berkembang karena pada hakikatnya kondisi suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain sebagai akibat dari adanya permintaan dan penawaran antar wilayah. pada analisis ini diperlihatkan mengenai penyebaran fenomena tertentu (analisis keruangan), dan interaksi antar variabel manusia dan lingkungannya untuk kemudian dipelajari kaitannya (Bintarto,1979).

Penyebaran sekolah dipelosok tanah air tidak merata karena diakibatkan daerah kota-kota besar terjadi daerah padat penduduk sementara daerah terpencil atau desa terdapat daerah jarang penduduk. Hal ini akan menyulitkan dalam penyediaan sarana pendidikan. dan sering kali gedung sekolah banyak ditemukan menumpuk disatu lokasi atau disatu daerah sementara dilokasi lain gedung sekolah tidak ada terdapat sama sekali. Suatu lokasi sekolah yang jauh tidak akan menyulitkan siswa menuju sekolah apabila didukung oleh sarana transportasi yang baik dan kondisi jalan yang baik pula. Perkembangan pendidikan dipengaruhi juga oleh penyebaran sekolah-sekolah yang ada, baik SD, SMP, maupun SMA. Penyebaran sekolah akan mempengaruhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat. Jumlah penduduk indonesia terus meningkat dari tahun ketahun, hal ini akan menambah jumlah anak usia sekolah. Bertambahnya jumlah anak usia sekolah menuntut peningkatan terhadap kebutuhan pendidikan.

Kebutuhan pendidikan di setiap daerah dilihat dari tiga indikator pendidikan yaitu indikator input, proses dan output atau dampak. Indikator input terdiri jumlah penduduk menurut kelompok usia sekolah, jumlah sarana pendidikan umum, rasio murid-guru, rasio murid-kelas. Indikator proses terdiri atas Angka Partisipasi Murni (APM) masyarakat terhadap pendidikan. Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah

penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Kasar adalah angka perbandingan jumlah absolut murid laki-laki dan perempuan. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Adanya perbedaan nilai APM dan APK disebabkan oleh berbagai hal didalam bidang pendidikan. Indikator output atau dampak dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan dan angka putus sekolah.

Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jaminan agar terwujudnya hal tersebut adalah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, yaitu sarana yang dapat memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standard sarana dan prasarana.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) semakin mengukuhkan pentingnya peran sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan dalam menyokong peningkatan mutu pendidikan nasional. Dalam Permendiknas tersebut dijelaskan bahwa satu SD/MI disediakan untuk 1600 penduduk, atau satu desa/kelurahan, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs disediakan untuk 4800 penduduk dan minimum

SMP/MTs satu kecamatan. Begitu pula untuk tingkat SMA, minimum satu SMA/MA/SMK disediakan untuk satu kecamatan.

Begitu juga dengan Kabupaten Nias Barat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara pendidikan di SD, SMP, dan SMA adalah pemerintah Kabupaten. Kabupaten Nias Barat salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Jumlah sekolah keseluruhan yang tersebar adalah 177 sekolah (162 milik pemerintah dan 15 milik swasta), yakni SD (Sekolah Dasar) 105 sekolah, SMP (Sekolah Menengah Pertama) 46 sekolah, SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/Kejuruan) 26 sekolah (BPS Kabupaten Nias Barat, 2012).

Kabupaten Nias Barat adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. dengan luas wilayah 473,73 km² yang terdiri dari 8 kecamatan dan 110 desa. Jumlah penduduk di Kabupaten Nias Barat pada tahun 2012 sebanyak 89.637 Jiwa (Sumber: BPS Kabupaten Nias Barat, 2012).

Dari data jumlah penduduk dan jumlah sekolah di Kabupaten Nias Barat terdapat ketidakmerataan pola persebaran satuan pendidikan (SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK) di setiap kecamatan, bahkan ada satu kecamatan yang tidak ada SMP (Sekolah Menengah Pertama) yaitu Kecamatan Mandrehe Utara. Penyebaran pembangunan sekolah yang tidak merata mengakibatkan adanya kesenjangan terhadap pemerataan pendidikan di Kabupaten Nias Barat.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi dari uraian latar belakang adalah (1) Kesesuaian jumlah penduduk dengan jumlah sekolah (SD, SMP dan SMA/SMK) di Kabupaten Nias Barat. (2) Pola persebaran satuan pendidikan. (3) Daya dampak

sekolah di Kabupaten Nias Barat. (4) Kualitas sekolah di Kabupaten Nias Barat. (5) Jumlah sekolah yang terdapat di Kabupaten Nias Barat. (6) Faktor dominan yang mempengaruhi persebaran sekolah di Kabupaten Nias Barat.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya mengetahui faktor dominan yang menyebabkan terjadinya persebaran satuan pendidikan, kesesuaian persebaran satuan pendidikan dengan daya tampung sekolah dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan bagi penduduk usia sekolah. dan persebaran satuan pendidikan di Kabupaten Nias Barat.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola persebaran satuan pendidikan di Kabupaten Nias Barat?
2. Bagaimana daya tampung sekolah dihitung berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Rasio siswa per kelas.?
3. Apa faktor dominan yang mempengaruhi persebaran satuan pendidikan di Kabupaten Nias Barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola persebaran satuan pendidikan di Kabupaten Nias Barat.
2. Untuk mengetahui kesesuaian persebaran satuan pendidikan dengan daya tampung sekolah dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Nias Barat.
3. Untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi persebaran satuan pendidikan di Kabupaten Nias Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Nias Barat agar masyarakat mampu menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan tentang sarana dan prasarana pendidikan.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam kajian yang sama dengan waktu dan tempat yang berbeda.
3. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dalam membuat karya ilmiah.

